BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori utama yang mendasari konsep *good corporate governance* adalah teori keagenan. Ketika pemilik (*principal*) mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan pada pihak lain, terdapat hubungan keagenan antara kedua pihak. Teori keagenan mengemukakan hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) dalam hal pengelolaan perusahaan, dimana principal merupakan suatu entitas yang mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan kepada pihak *agent* (manajemen) (Luayyi, 2010).

Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen laba. Untuk meminimalisir manajemen laba yang terjadi harus adanya penerapan *corporate governance*. Dalam memahami corporate governance dapat digunakan perspektif keagenan sebagai dasar pemikiran. Suatu hubungan antara manajer *(agent)* dengan investor *(principal)* disebut hubungan keagenan. Adanya perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan konflik antara manajer *(agent)* dengan investor (principal) memicu timbulnya biaya keagenan *(agency cost)*. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Dengan demikian teori keagenan *(agency theory)* berkaitan dengan usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang timbul dalam hubungan keagenan.

Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Dengan demikian teori keagenan *(agency theory)* berkaitan dengan usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang timbul dalam hubungan keagenan. Selain itu, masalah keagenan juga akan terjadi antara *agent* dan *principals* mempunyai sikap atau pandangan yang berbeda terhadap risiko. Anggapan yang melekat pada teori keagenan

adalah bahwa antara agent dengan principals terdapat konflik kepentingan. Konflik kepentingan bisa terjadi antara seorang manajer yang ingin memaksimumkan kekayaannya sendiri dengan pemegang saham yang juga ingin memaksimumkan kekayaannya. Konflik akan terjadi jika usaha manajer untuk memaksimumkan kekayaannya tidak memaksimumkan kekayaan pemegang saham. *Agency Theory* menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu hubungan kontrak *(loosely defined)* antara pemegang sumber daya. Suatu hubungan *agency* muncul ketika satu atau lebih dari individu, yang disebut pelaku *(principals)*, memperkerjakan satu atau lebih individu lain, yang disebut *(agent)*. *Agency Theory* menimbulkan masalah mendasar dalam organisasi "perilaku mementingkan diri sendiri".

Manajer sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham. Karena manajer pemegang saham memiliki hak untuk mengelola antara dua kelompok. Satu-satunya informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja yang selanjutnya diinginkan sebagai dasar dalam pemberian *reward* adalah informasi akuntansi, karena informasi ini dianggap lebih objektif daripada informasi lainnya. Informasi akuntansi juga digunakan oleh para principal untuk menilai kinerja para manajer. Manajer cenderung melakukan perataan *(smoothing)* dengan memanipulasi informasi sedemikian rupa agar kinerjanya tampak bagus.

Menurut (Puspita, 2016) para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu *corporate governanace* dan *earnings management*. Adanya pemisahan kepemilikan oleh principal dengan

pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenen diantara principal dan agen. Laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggung jawaban kinerjanya, principal dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada agen.

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer.

2.2 Manajemen Laba

2.2.1 Pengertian Manajemen Laba

Beberapa peneliti mendefenisikan manajemen laba dalam arti yang berbeda-beda. Manajemen laba merupakan campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba sendiri dapat mengakibatkan berkurangnya kredibilitas laporan keuangan, menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat membuat pemakai laporan keuangan mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Dalam penerapan akuntansi akrual, prinsip akuntansi berterima umum memberikan fleksibilitas dengan mengijinkan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi dalam pelaporan laba. Fleksibilitas ini dimaksudkan agar manajer dapat menginformasikan kondisi ekonomi sesuai realitanya. Fleksibilitas prinsip akuntansi inilah yang dapat memberikan peluang bagi manajer untuk mengelola laba.

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat kini dari suatu unit yang menjadi tanggung jawab manajer tanpa mengkaitkan dengan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang. Akuntansi akrual terdiri dari *discretionary accruals* (DA) dan non *discretionary accruals* (NDA). DA merupakan akrual yang ditentukan manajemen *(management determined).* Manajer dapat memilih kebijakan dalam hal metoda dan estimasi akuntansi.

Definisi manajemen laba adalah suatu intervensi yang memiliki tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, demi mendapatkan keuntungan yang sifatnya pribadi seperti diungkapkan. Manajemen laba akan membuat laba tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang ada, sehingga kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Laba yang disajikan mungkin tidak mencerminkan realitas ekonomi, tetapi lebih karena keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupa sehingga kinerjanya dapat terlihat baik (Hernando, 2018).

Dalam hubungannya dengan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relative lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan pihak eksternal. Hal ini dapat member kesempatan kepada manajer untuk memanipulasi laporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya. Manajemen laba merupakan masalah keagenan yang seringkali dipicu oleh adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen persahaan. Manajer melakukan manipulasi laba melalui manajemen laba agar laba nampak sebagaimana yang diharapkan.

2.2.2 Faktor Pendorong Manajemen Laba

Menurut (Rohayati, 2019) ada beberapa faktor perusahaan melakukan manajemen laba adalah:

1. Motivasi Bonus

   Manajer akan berusaha mengatur laba bersih perusahaan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan didapatnya.

2. Motivasi Kontrak

   Manajer menaikkan laba bersih untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami technical default dalam utang jangka panjangnya.

3. Motivasi Politik

   Manajer tidak dapat melepaskan aspek politis dan perusahaan, khususnya perusahaan besar dan industri yang strategis karena aktifitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak.

4. Motivasi pajak

   Manajer terkadang mengambil tindakan untuk mengurangi laba bersih perusahaan yang dilaporkan untuk pembayaran pajak yang lebih kecil pula.

5. Pergantian CEO *(Chief Executive Officer)*

   Banyak motivasi yang timbul berkaitan dengan CEO, seperti CEO yang mendekati masa pensiun akan meningkatkan bonusnya, CEO yang kurang berhasil memperbaiki kinerjanya untuk menghindari pemecatannya, serta CEO baru yang sengaja melakukan manajemen laba untuk menunjukkan kesalahan dari CEO sebelumnya.

6. Penawaran saham perdana (IPO)

   Manajer perusahaan yang *go public* melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya dengan harapan mendapatkan respon pasar yang positif terhadap peramalan laba sebagai sinyal dari nilai perusahaan.

7. Motivasi pasar modal

   Manajer sengaja melakukan manajemen laba misalnya untuk mengungkapkan informasi pribadi yang dimiliki perusahaan kepada investor dan kreditor.

2.2.3 Bentuk/Pola Manajemen Laba

(Rohayati, 2019) menyatakan bahwa terdapat beberapa pola dalam manajemen laba, yaitu:

a. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi pada saat pengangkatan CEO baru dengan cara melaporkan kerugian dalam jumlah besar yang diharapkan dapat meningkatkan laba dimasa datang.

b. *Income Minimization*

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada masa mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

c. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar.

d. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

2.2.4 Metode Pengukuran Manajemen Laba

Metode pengukuran ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya manajemen laba. Pada dasarnya, definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. (Rohayati, 2019) membagi model akrual manajemen laba menjadi beberapa model, yang antara lain:

a. Model Healy (1985)

   Model ini dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985 dan merupakan model yang relatif sederhana karena menggunakan total akrual sebagai proksi manajemen laba. Padahal, total akrual merupakan penjumlahan *discretionary accruals* (DA) dan *nondiscretionary accruals* (NDA). DA merupakan komponen akrual yang dapat direkayasa pihak manajer,

sedangkan NDA merupakan komponen akrual yang tidak dapat direkayasa pihak manajer. NDA dapat dirumuskan seperti di bawah ini:

$$NDAt = 1 / n\sum y\ (TAy/Ay-1)$$

b. Model De Angelo (1986)

Model De Angelo memprediksi manajemen laba dengan menghitung total akrual sebagai selisih antara laba akuntansi dengan arus kas operasi periode bersangkutan atau dirumuskan sebagai berikut: Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo pada tahun 1986.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih *(net income)* dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

TAC = *Net income – Cash flows from operation*

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDAt = \frac{TAC}{TA\ t-1}$$

Keterangan :

NDA t = Discretionary accruals yang diestimasi.

TAC t = Total akrual periode t.

TA t-1 = Total aktiva periode t-1.

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total *akrual* (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionanry accruals* merupakan proksi manajemen laba.

2.3 Asimetri informasi

2.3.1 Pengertian Asimetri informasi

Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana agent mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan *principal.* Kondisi ini memberikan kesempatan kepada agent menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya. (Manalu, 2016) menyatakan, asimetri informasi ini mengakibatkan terjadinya *moral hazard* berupa usaha manajemen untuk melakukan *earnings management*. Laporan keuangan dibuat guna memenuhi kepentingan-kepentingan untuk pihak internal perusahaan dan pihak eksternal. Pihak internal yang dimaksud terdiri dari karyawan, manajer dan yang lainnya. Pihak eksternal yang dimaksud terdiri dari pemegang saham, kreditor, masyarakat umum dan yang lainnya.

Pihak internal perusahaan tentunya lebih mengetahui kondisi keuangan dan hal-hal apa saja yang sedang berlangsung didalam perusahaan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi antara pihak agent dan principal adalah adanya asimetri informasi. Dimana hal tersebut merupakan sebuah konflik yang salah satu pesertanya memiliki keunggulan besar atas suatu aspek dari yang lainnya. Manajer memiliki informasi pribadi tentang perusahaan dan pendapatan saat ini sedangkan pemegang saham tidak memiliki potensi tersebut. Adanya kesenjangan informasi yang terjadi diantara kedua belah pihak mendorong pihak manajemen untuk melakukan tindakan oportunis yang akan memberikan utilitas bagi dirinya. Selain itu, pihak manajemen hanya akan mengungkapkan informasi yang dianggap memberikan keuntungan bagi dirinya, namun jika informasi tersebut tidak memberikan manfaat baginya maka informasi tersebut tidak akan diungkapkan.

2.3.2 Jenis-jenis Asimetri Informasi

Menurut (Rohayati, 2019) terdapat dua tipe asimetri informasi, yaitu:

1. *Adverse selection*,

   yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar, dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak dapat disampaikan informasinya kepada pemegang saham.

2. *Moral hazard*,

   yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seharusnya diketahui pemegang saham maupun pemberi pinjaman sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

2.3.3 Pengukuran Asimetri Informasi

Dalam melakukan pengukuran terhadap asimetri informasi, penulis menggunakan proksi bid-ask spread. Bid-ask spread adalah selisih dari harga bid dan ask sehingga disebut bid-ask spread.

Menurut (Rohayati, 2019) estimasi asimetri dapat dilakukan berdasarkan 3 kategori utama, yaitu:

1. Berdasarkan *analyst forecast.*

   Metode ini dikembangkan berdasarkan pemikiran dari Blackwell dan Dubins. Proxy yang digunakan adalah keakuratan analis dalam melakukan prediksi atas *earning per share* (EPS) dan diprediksi para analis sebagai ukuran asimetri informasi. Masalah yang sering timbul dari perhitungan ini adalah para analis seringkali bersikap *over-reacting* terhadap informasi positif dan bersikap *under-reacting* terhadap informasi negative, ada hubungan yang positif antara pendapat dengan selisih harga *bid-ask.*

2. Berdasarkan kesempatan berinvestasi.

   Bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi mempunyai kemampuan lebih baik untuk memprediksi arus kas pada periode mendatang, prediksi tersebut berdasarkan aset perusahaan. Beberapa proksi yang banyak digunakan adalah rasio *market value to book value* dari *ekuitas, market to book value* dari *asset, price earning ratio*. Alasan penggunaan rasio tersebut adalah: - *Rasio market to book value* dari ekuitas dan asset, selain mencerminkan kinerja perusahaan, juga mencerminkan potensi pertumbuhan perusahaan dengan aset yang dimilikinya. *Price earning ratio* mencerminkan risiko dari pertumbuhan earning yang dihadapi perusahaan.

3. Berdasarkan teori *market microstructure.*

   Yang menjadi perhatian luas dari teori ini adalah bagaimana harga dan volume perdagangan dapat terbentuk. Untuk melihat kedua faktor tersebut terbentuk melalui *bid-ask spread* yang menyatakan bahwa terdapat suatu komponen *spread* yang turut memberikan kontribusi kerugian yang dialami dealer (perusahaan) ketika melakukan transaksi dengan pedagang terinformasi *(informed traders).Bid-ask spread* merupakan selisih harga beli tertinggi dimana trader (pedagang saham) bersedia membeli suatu saham dengan harga jual terendah dimana trader bersedia menjual saham tersebut.

2.3.4 Teori *Bid-Ask Spread*

Menurut (Manalu, 2016) jika seorang investor ingin membeli atau menjual suatu saham atau sekuritas lain di pasar modal, dia biasanya melakukan transaksi melalui *broker/dealer* yang memiliki spesialisasi dalam suatu sekuritas. *Broker/dealer* inilah yang siap untuk menjual pada investor untuk harga ask jika investor ingin membeli suatu sekuritas. Jika investor sudah mempunyai suatu sekuritas dan ingin menjualnya, maka *broker/dealer* ini yang akan membeli sekuritas dengan harga *bid*. Perbedaan antara harga *bid* dan harga *ask* adalah *spread*. Jadi, *bid-ask spread* merupakan selisih harga beli tertinggi bagi broker/dealer bersedia untuk membeli suatu saham dan

harga jual dimana broker/dealer bersedia untuk menjual saham tersebut. Dalam mekanisme pasar modal, pelaku pasar juga menghadapi masalah keagenan. Pasrtisipan pasar saling berinteraksi di pasar modal guna mewujudkan tujuannya, membeli atau menjual sekuritas.

Aktivitas yang mereka lakukan utamanya dipengaruhi oleh informasi yang diterima, baik secara langsung (laporan publik) maupun tidak langsung *(insider trading)*. Dealers atau market makers sebagai salah satu partisipan pasar modal mempunyai kemampuan yang terbatas terhadap persepsi yang akan datang, dan menghadapi potensi kerugian dari pedagang yang terinformasi *(informed traders)* karena mereka tidak memiliki informasi yang superior sebagaimana pedagang yang terinformasi. Timbulnya masalah adverse selection yang mendorong dealer untuk menutupi kerugian dari pedagang yang terinformasi dengan meningkatkan spread-nya terhadap pedagang yang liquid. Jadi, dapat dikatakan bahwa asimetri informasi yang terjadi antara dealer dan pedagang yang terinformasi tercermin pada spread yang ditentukannya.

2.4 *Good Corporate Governance*

2.4.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good corporate governance merupakan cara kerja, cara pengambilan keputusan dan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Prinsip *good corporate governance* dapat dijadikan sebagai model untuk memperbandingkan sebuah lembaga pemerintahan atau instansi lain antara yang baik dengan yang buruk.

FCGI menjelaskan, bahwa tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan *(stakeholders)*. Pelaksanaan GCG harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

1. Transparansi *(transparency)*

yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;

2. Akuntabilitas *(accountability)*

   yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;

3. Pertanggungjawaban *(responsibility)*

   yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan perusahaaan yang sehat;

4. Independensi *(independency)*

   yaitu pengelolaan perusahaaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan

5. Kewajaran *(fairness)*

   yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Tujuan dari penerapan *good corporate governance* adalah sebagai berikut: (Sudrajat, 2017) yaitu :

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.
2. Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri.
3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan.
4. Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang energi dan petrokimia.
6. Meningkatkan kinerja Perusahaan dan Kinerja Karyawan.

2.5 Praktek *Good Corporate Governance*

Good corporate governance merupakan suatu sistem tata kelola yang mengatur, dan mengendalikan kinerja perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada pemegang saham. Dengan demikian penerapan *good corporate governance* dipercaya dapat memajukan kinerja perusahaan. macam-macam dari praktek *good corporate governance* tersebut antara lain meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit.

2.5.1 Kepemilikan Manajerial

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku opportunistik manajer akan meningkat.

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer mempunyai saham perusahaan, sehingga dalam hal ini manajer sebagai pengelola perusahaan juga pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diketahui dari besarnya prosentase kepemilikan saham perusahaan dalam laporan keuangan. Menurut (Sukmawati, 2017) kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pihak manajerial dalam suatu perusahaan adalah pihak yang secara aktif berperan aktif dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan perusahaan. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan.

2.5.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. Bila dihubungkan dengan fungsi monitoring, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen yang lebih baik dibandingkan secara individual. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Kepemilikan Instutisional merupakan pendiri atau pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan. Semakin besar presentase saham yang dimiliki investor institusional akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer dan mengurangi *agency cost*. Kepemilikan saham oleh pihak berbentuk institusi, seperti bank, perusahaan ansuransi, perusahaan inventasi, dan pensiun dan institusi lain dapat mengurangi pengaruh dari kepentingan lain dalam perusahaan seperti kepentingan peribadi manajer dan debtholders. Kepemilikan institusi yang menguasai saham mayoritas tersebut dapat melakukan pengawasan serta pengendalian yang lebih kuat dan efektif terhadap kebijakan manajemen.

2.5.3 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perseroan terbatas (PT). Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Non-executive director dewan komisaris dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen.

2.5.4 Dewan Direksi

Dewan direksi adalah *board of directors*, yaitu pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi adalah *board of directors* dapat berfungsi sebagai alat pengendalian tertinggi bagi perusahaan. Dewan direksi bertugas untuk melakukan monitoring terhadap tindakan manajer sehingga kejadian seperti kecurangan dapat dicegah. Tindakan monitoring yang dilakukan dapat mengurangi biaya agensi melalui penekanan bagi manajer untuk melakukan pengungkapan informasi mengenai modal intelektual secara relevan dan akurat. Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan. Fungsi service menyatakan bahwa dewan (komisaris) dapat memberikan konsultasi dan nasihat manajemen (direksi).

2.5.5 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan diresi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang GCG. Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan kata lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas suatu perusahaan yang mengawasi pengelolahan perusahaan.

2.5.6 Komite Audit

Sesuai dengan peraturan kepala bapepam-LK No : IX/I/5/ Tanggal 7 Desember 2012 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite merupakan organ yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Tujuan

dibentuknya komite audit adalah untuk membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit dalam menjalankan fungsinya harus memiliki hak terhadap akses tidak terbatas kepada direksi, auditor internal dan auditor eksternal dan semua informasi yang ada dalam perusahaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris menjadi intermediaries atau penghubung antara dewan komisaris dan auditor eksternal perusahaan.

2.5.7 Kepemilkan Asing

Kepemilikan asing adalah orang asing yang memiliki saham perusahaan baik berupa organisasi maupun perorangan pribadi. Dengan adanya penanaman modal asing, maka pemilik modal biasanya juga akan merekomendasikan anggota dewan yang juga berkewarganegaraan asing. Melalui penanaman modal asing, investor asing dapat melakukan pengawasan dan memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi dengan adanya diversitas dalam penanaman modal asing maka akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan.

2.5.8 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah situasi dimana pemerintah memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain pemerintah tersebut sekaligus pemegang saham perusahaan (Puspita, 2016). Adanya kepemilikan saham oleh pemerintah dalam struktur modal perusahaan menyebabkan perusahaan tersebut harus menjalankan proses bisnisnya selaras dengan kepentingan pemerintah. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang besarakan mendapatkan sorotan yang lebih besar dari masyarakat, karena masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. Besarnya tekanan pemerintah dan publik membuat perusahaan harus lebih transparan dalam manajemennya. Sesuai dengan UU PT No.40 Tahun 2007, Perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai media pelaporan tanggung jawab manajemen. Sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan perusahaan maka

dilakukan pengungkapan informasi yang lebih luas mengenai sumber daya perusahaan yang berkaitan erat dengan penciptaan nilai bagi perusahaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Purnama, 2017)	Pengaruh *Profitabilitas, Leverage,* Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
2.	(Rohayati, 2019)	Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Sub Sektor Industri Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
3	(Utomo, Prayitno, 2020)	*Good Corporate Governance* Moderasi Pengaruh Antara Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba	Hasil penelitian menunjukan asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan GCG memperlemah hubungan antara keduanya pada perusahaan perbankan. Hal ini terlihat dari hasil uji hipotesis yang dilakukan. Dengan tingkat keyakinan 95% dihasilkan nilai uji analisis statistik yang menunjukkan bahwa GCG memperlemah pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan.
4	(Jannati & Edy, 2020)	*Good Corporate Governance* Sebagai Pemoderasi: Hubungan Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan LQ 45	Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel *good corporate governance* menunjukkan hasil negatif signifikan. Ini berarti bahwa *good corporate governance* mampu melemahkan atau menurunkan pengaruh asimetri informasi pada manajemen laba.

5	(Franklin & Elvis, 2020)	Pengaruh Asimetri Informasi Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Asimetri informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, (2) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (3) Proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap laba manajemen, (4) Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.7 Kerangka Pemikiran

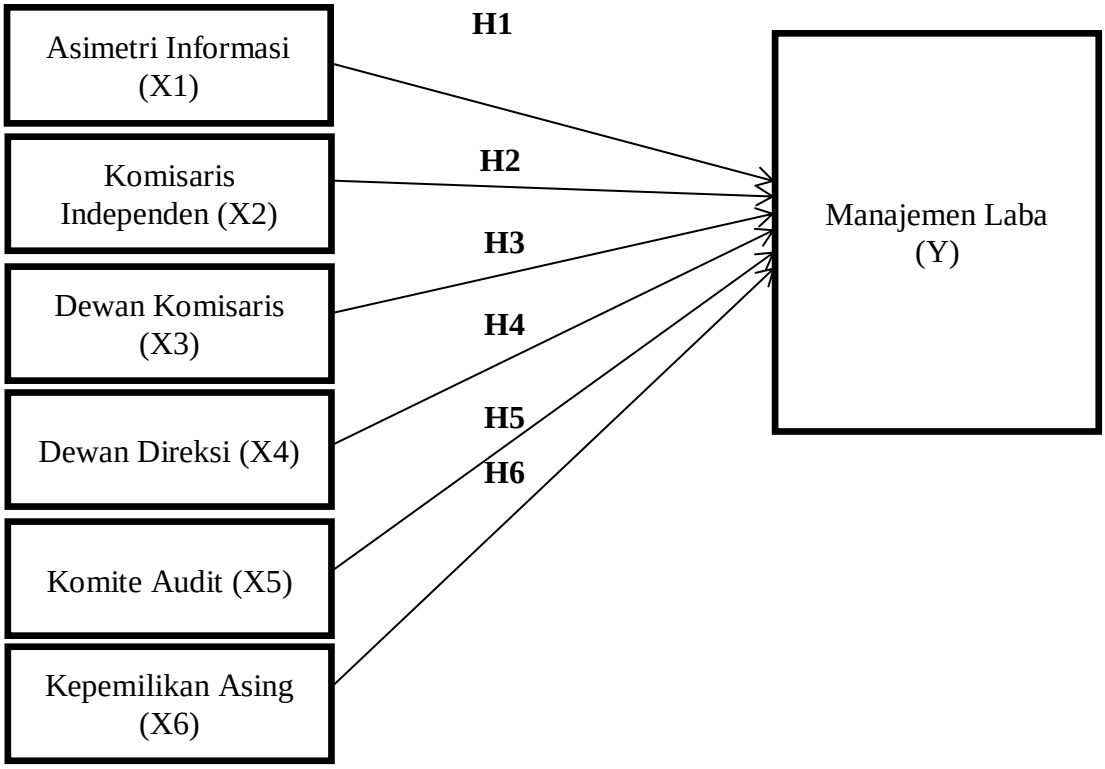

Gambar 2.1

Kerangka Hipotesis

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Asimetri informasi terhadap manajemen laba.

Asimetri informasi ialah keadaan, dimana agent mempunyai paparan lebih tentang perusahaan, serta prospek perusahaan dimasa datang dibanding principal. Kondisi demikian, menjadi pemicu terjadinya usaha manajer untuk memanipulasi laba di sebuah perusahaan. Kondisi demikian

sebenarnya dapat diminimalisir dengan langkah menerapkan transparansi dalam pemberian data seputar keuangan pada prinsipal. Dengan transparansi pelaporan serta penyajian informasi, agent (manajer) akan berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak untuk memanipulasi laba, bahkan kecil kemungkinan hal demikian dapat terjadi, terkecuali tindakan itu dilakukan atas kesepakatan bersama (prinsipal dan agen) (Hernando, 2018).

Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen laba. Semakin banyak informasi mengenai internal perusahaan yang dimiliki oleh manajer daripada pemegang saham maka manajer akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk melakukan manajemen laba. Dalam penyajian informasi akuntansi, khususnyapenyusunan laporan keuangan, agent juga memiliki informasi yang asimetri sehingga dapat lebih fleksibel mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan kepentingannya (Franklin & Elvis, 2020). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Utomo, Prayitno, 2020) menunjukan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_1 : Asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.8.2 Pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba

Komisaris independen memiliki fungsi sebagai pengawas kebijakan manajemen dan memberi nasihat kepada manajemen yang bertindak sebagai wakil dari pemilik perusahaan. Komisaris independen merupakan alat monitoring terbaik dalam mengawasi tindakan dan kebijakan yang diambil manajemen agar dapat tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Komposisi dewan komisaris independen merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan komisaris yang tepat dan diharapkan dapat mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan

laba yang berkualitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Sudrajat, 2017) menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif pada variabel *discretionary accruals*. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_2: Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.8.3 Pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen laba

Menurut Komite nasional kebijakan govenance fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. Berikut komposisi, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris: Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan tingkat kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan, Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasa dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan bisnis dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (Franklin & Elvis, 2020).

Kategori terafiliasi juga adalah mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu komisaris independen harus mempunyai latar belakang keuangan atau akuntansi. Proporsi dewan komisaris independen bisa membantu dalam membatasi manajemen untuk melakukan aktivitas manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawati, 2018) menunjukan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_3: Dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.8.4 Pengaruh dewan direksi terhadap manajemen laba

Dewan direksi merupakan dewan yang dipilih oleh pemegang saham yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan, untuk tujuan pemegang saham (Franklin & Elvis, 2020). Ukuran dewan direksi ditujukkan dengan jumlah anggota dewan direksi yang dimiliki perusahaan. Berkenaan dengan dilakukannya praktik manajemen laba menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan manajemen laba lebih besar kemungkinan memiliki Dewan Direksi yang didominasi oleh manajemen dan lebih besar kemungkinan memiliki CEO yang secara simultan juga sebagai *Chairman of the Board*. Dewan direksi adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Direksi harus mengelola perusahaan berdasarkan kepentingan bersama terutama pemegang saham, karena direksi tersebut dipilih melalui RUPS dalam perusahaan.

Secara umum peranan dan tugas direksi ialah menjalankan fungsi pengendalian perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan kepercayaan di masa mendatang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Sukmawati, 2017) menunjukan bahwa menemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara ukuran dewan direksi terhadap manajemen laba dengan menggunakan tingkat kesalahan 10%. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_4: Dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.8.5 Pengaruh komite audit terhadap manajemen laba

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang bekerja berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite

Audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit adalah pihak yang menjadi penghubung antara pihak eksternal auditor dan manajemen perusahaan sehingga Komite Audit dituntut harus independen dalam menjalankan tugasnya tersebut. Komite Audit diwajibkan untuk membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan komite audit kepada dewan komisaris sebagai bentuk tanggung jawab penugasan komite audit. Hal ini disebabkan karena keberadaan komite audit disuatu perusahaan memiliki peranan penting dalam memastikan keakuratan laporan keuangan perusahaan tersebut. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektivitas dari pengawasan komite audit dapat mengurangi praktik manajemen laba (Eka & Murtanto, 2017).

Keefektivitasan komite audit dapat diukur dengan aktivitas komite audit atas penelaahan efektivitas pengendalian internal, evaluasi kinerja auditor eksternal, jumlah rapat dan jumlah kehadiran dalam rapat komite audit, ukuran komite audit, dan keahlian komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Fathoni & Hermawan, 2016) menyatakan bahwa komite audit dalam membantu tugas pengawasan dewan komisaris mampu menurunkan tingkat manajemen laba diperusahaan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_5: Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.8.6 Pengaruh kepemilikan asing terhadap manajemen laba

Menurut UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dijelaskan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Investor asing memainkan peran independen dalam menahan earnings management

yang bersifat riil, yang dilakukan melalui arus kas operasi yang tidak normal, beban discretionary yang tidak normal, maupun biaya produksi yang tidak normal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Anggaraini, 2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan *foreign institutional* memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_6: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.